BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perkembangan perspektif dalam studi hubungan internasional semakin beragam tiap tahunnya. Isu-isu yang dibahas dalam dunia internasional tidak hanya mencakup sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan lagi namun mulai merambah pada isu-isu lingkungan. *Green politics* kemudian terbentuk sebagai sebuah kekuatan politik yang signifikan di banyak negara dimulai dari pertengahan 1970-an (Paterson dalam Burchill, 2005: 235).

Isu lingkungan hidup menjadi sebuah topik yang semakin hangat dalam masyarakat internasional. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran bahwa jumlah masyarakat yang terus meningkat mengakibatkan aktivitas sosial ekonomi manusia yang mengancam lingkungan. Saat ini hampir disemua bidang ilmu pengetahuan membahas mengenai pencemaran lingkungan dan usaha untuk memperbaikinya, termasuk dalam studi hubungan internasional. *Green Theory* dalam hubungan internasional mencoba untuk memberikan penjelasan tentang musnahnya alam sekitar oleh manusia, dan suatu pondasi normatif yang menentang pemusnahan ini dan menciptakan masyarakat berkelanjutan (Burchill & Linklater, 2009: 336).

Pemanasan global, polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan dan kendaraan, peningkatan gas *chlorofluorocarbon* (CFC) menjadi permasalahan lingkungan yang semakin terasa kehadirannya di tengah masyarakat dunia

(Jackson dan Sorensen, 2005: 325). Atas dasar inilah para akademisi dan praktisi hubungan internasional mulai memasukkan isu lingkungan ke dalam komponen-komponen pengkajiannya. Terdapat pemikiran dan sebutan yang berbeda-beda dalam hubungan internasional apabila dikaitkan dengan isu lingkungan hidup ini di antaranya adalah Politik Hijau, *Green Perspective*, dan *Green Political Theory* (Burchill dan Linklater, 2009: 336).

Perubahan iklim yang semeakin terasa hingga memunculkan perhatian dan kepedulian banyak negara. Perhatian internasional tersebut menimbulkan usaha-usaha untuk menghadapi isu lingkungan hidup tersebut. Sifatnya yang global tentunya membutuhkan paartisipasi menyeluruh semua anggota masyarakat internasional baik negara maju maupun negara berkembang. Diadakannya berbagai pertemuan tingkat internasional ini merupakan sebuah pertanda bahwa negara-negara di dunia mulai menyadari pentingnya aspek lingkungan sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dari banyak negara (*The Indonesian Institute*, 2012: 1).

Pada umumnya, pertemuan-pertemuan internasional terkait perubahan iklim diadakan oleh PBB yaitu melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang kemudian dilaksanakan secara rutin melalui *Conference of Party* (COP). Keputusan penting pertama yang dihasilkan melalui *Conference of Party* (COP) adalah *Protokol Kyoto* (berdasarkan hasil COP-3 di Kyoto pada tahun 1997) yang menetapkan besaran emisi yang harus dikurangi oleh negara-negara maju (*The Indonesian Institute*, 2012: 3).

Pada *Protocol Kyoto* sebagai hasil dari COP-3, melahirkan beberapa keputusan dasar yang penting terkait perubahan iklim ini. Uni Eropa adalah pemeran utama dalam pertemuan-pertemuan awal UNFCCC. Merekalah yang paling mendesak penciptaan hukum untuk mengatur pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara maju selain Uni Eropa, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada, lebih memilih pendekatan yang fleksibel terkait pengurangan emisi gasnya. Di sisi lain, negara-negara berkembang yang tergabung dalam G-77 dan Cihna secara umum bersikap defensif dan negatif di dalam COP. Perbedaan bahasa, kurangnya kemampuan bernegosiasi, serta rendahnya prioritas *climate change* dalam politik lokal membuat negara-negara berkembang menjadi kurang memiliki andil dalam pembuatan keputusan (*The Indonesian Institute*, 2012: 6).

Perbedaan pendapat di antara negara-negara maju dan kurangnya partisipasi negara-negara berkembang membuat UNFCCC tidak dapat menghasilkan keputusan penting lagi sampai tahun 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah COP-13. Dari pertemuan tersebut, dihasilkanlah *Bali Road Map*, yang berisi keputusan-keputusan jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim. UNFCCC pun menjadi lebih terarah semenjak *Bali Road Map* dirumuskan. Dalam waktu tiga tahun setelah COP-13, dihasilkanlah *Cancun Agreement* yang menginisiasi terciptanya *Green Climate Fund* untuk memberikan dana bagi negaranegara berkembang agar dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan setahun setelah *Cancun Agreement*, UNFCCC akhirnya dapat memulai untuk

menciptakan kesepakatan hukum di antara negara-negara anggotanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (*The Indonesian Institute*, 2012: 6).

Pada awalnya, sebelum konferensi di Bali, muncul perbedaan pendapat antara negara maju *(Annex I)* dengan negara berkembang *(Non-Annex)*. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa negara-negara maju harus segera memenuhi komitmen dan kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai target dalam *Protocol Kyoto*. Sebaliknya negara-negara maju ingin membuktikan pemanasan global secara ilmiah terlebih dahulu untuk menemukan teknologi murah untuk mengatasinya sehingga tidak menjadi beban ekonomi. COP ke-13 di Bali akhirnya menyepakati jalan tengah yang bisa menjembatani antara negara-negara utara dan selatan. Hasil negoisasi COP-13 akhirnya mengadopsi kesepakatan penting yaitu *Bali Road Map* dan *Bali Action Plan* (Hadad dalam Prisma, 2010: 14).

Bali Road Map adalah kesepakatan mengenai proses selama dua tahun (2008-2009) tentang bagaimana mengatasi perbedaan dalam cara pendekatan dan wadah perundingan di antara negara berkembang dengan negara maju. Jalur pertama berada di bawah konvensi PBB tentang perubahan iklim untuk pembahasan dan degosiasi isu-isu jangka panjang atau *Adhoc working Gropu on Long-term Cooperative Action* (AWG-LCA). Sementara jalur kedua berada di bawah perjanjian *Protocol Kyoto*. Wadahnya adalah kelompok kerja komitmen *Annex I* atau *Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties* (AWG-KP) (Hadad dalam Prisma, 2010: 14).

Bali Action Plan merupakan hasil kesepakatan para pihak terkait mengenai substansi dan arah masa depan perundingan perubahan iklim yang diputuskan COP-13 di Bali. *Bali Action Plan* (BAP) memuat rencana tindak *(action plan)* untuk membentuk kelompok kerjaasama jangka panjang dengan mandat menanggulangi perubahan iklim dengan tidak hanya dengan mitigasi dan adaptasi saja, tetapi juga melalui empat elemen atau pilar utama kerjasama global berjangka panjang guna mengurangi pemanasan global yaitu mitigasi, adaptasi, pendanaan dan alih teknologi (Hadad dalam Prisma, 2010: 14).

Ada keputusan lain dalam *Bali Action Plan* (BAP) yang menjadi tonggak penting bagi negara berkembang yaitu diterimanya upaya mencegah deforestasi sektor kehutanan, khususnya *REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)* sebagai upaya menurunkan gas rumah kaca. Berdasarkan sejarah singkat di atas dan melihat peran Indonesia, dapat dilihat bagaimana COP-13, yang menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah, memiliki peran signifikan bagi perkembangan UNFCCC. Bagi Indonesia, ini dapat menunjukkan pada dunia betapa penting perannya dalam pembuatan keputusan di UNFCCC, terutama untuk mendorong kesepakatan global untuk menangani perubahan iklim. Hal ini juga menunjukkan komitmen Indonesia terkait diplomasi lingkungan.

Sebagai negara berekembang yang bergantung pada sumber daya alam dan sektor pertanian, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Namun demikian masih sulit diperkirakan seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Dilihat dari sisi lain, sebagai negara yang memiliki

tutupan hutan dan lahan gambut terluas di Asia, Indonesia termasuk negara penyerap karbon terbesar di dunia. Besarnya luas kerusakan hutan serta pesatnya laju konversi hutan dan degradasi lahan hutan selama ini, Indonesia dikhawatirkan masuk dalam jajaran negara pelepas dan penyumbang karbon terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara berkembang dengan emisi karbon cukup tinggi. Emisi karbon Indonesia memang masih di dominasi emisi dari sektor kehutanan, lahan gambut, limbah dan pertanian, namun seiring laju pertumbuhan ekonomi, emisi yang berasal dari sektor energi, industri dan transportasi menunjukan kenaikan cukup tinggi. Selain itu, Indoneisa juga mengalami kerusakan hutan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan penebangan liar menjadi faktor utama kerusakan hutan di Indonesia. Pada tahun 1998 hingga 2002 Indonesia mengalami deforestasi hutan yang mencapai 13,6 juta ha atau 3,4 juta ha per tahun dari total luas 100 juta hutan yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2002-2007 dari total hutan seluas 96 juta ha, terjadi deforestaasi sebesar 2,72 juta ha setiap tahun (Hadad dalam Prisma, 2010:14).

Salah satu pengaruh utama iklim di Indonesia adalah *El Niño-Southern Oscillation* yang setiap beberapa tahun memicu berbagai peristiwa cuaca ekstrim kita. *El Niño* berkaitan dengan berbagai perubahan arus laut di Samudera Pasifik yangmenyebabkan air laut menjadi luar biasa hangat. Kejadian sebaliknya, arus menjadi amat dingin, yang disebut *La Niña*. Terkait dengan peristiwa ini adalah Osilasi Selatan *(Southern Oscillation)* yaitu perubahan tekanan atmosfer di belahan dunia sebelah selatan. Perpaduan seluruh fenomena inilah yang dinamakan *El Niño-Southern Oscillation* atau disingkat ENSO (UNDP, 2007).

Peristiwa di Bali pada 2007 merupakaan tonggak penting bagi terciptanya momentum di dalam negeri. Sejak saat itu kesadaran, gerakan masyarakat, dan liputan media massa terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim makin gencar dan luas, selain melahirkan serangkaian terobosan kebijakan, program, dan lembaga-lembaga baru yang menunjukan peningkatan perhatian pemerintah terhadap isu perubahan iklim di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah memasukkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan. Dalam RPJPN 2005-2025, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalampembangunan. Kemudian diterjemahkan dalam RPJMN 2004-2009 dan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Upaya antisipasi perubahan iklim lebih spesifk dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) dan *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR).* Agenda mitigasi diarahkan untuk mereduksi emisi gas rumah kaca pada sektor-sektor ekonomi prioritas, yaitu sektor energi, kehutanan, pertanian-perikanan, dan infrastruktur yang didasarkan padap enetapan sasaran-sasaran reduksi per sektornya. Sedangkan agenda adaptasi diarahkan untuk mengembangkan polapembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan gangguan anomali cuaca yang terjadi saat ini, dan antisipasi dampaknya ke depan. Tujuan jangka panjangnya adalah terintegrasinya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Selain itu, harus berjalan bersamaan dengan usaha pemberantasan kemiskinan dan kegiatan pembangunan

ekonomi karena masyarakat miskin merupakan golongan yang palingrentan terhadap dampak perubahan iklim (DPR RI, 2009).

Terbitnya dokumen Rencana Aksi Nasional untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-MAPI) kemudian diikuti pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Pada Juni 2008 menandai langkah awal perubahan kebijakan pemerintah yang menganggap bahwa perubahan iklim juga menyangkut masalah pembangunan.

Selain kebijakan dalam negeri, Indonesia juga melakukan kerjasama-kerjasama internasional baik berupa kerjasama bilateral, multilateral maupun regional seperti kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam upaya menghadapi perubahan iklim dan kerusakan Hutan.

Di lingkungan internasional, Jerman menjadi pelopor di bidang pelindungan iklim dan perintis pemanfaatan energi terbarukan. Dengan perombakan sektor energi yang dinamakan transisi energi, Jerman meninggalkan era energi fosil dan nuklir, lalu memasuki masa depan yang ditandai oleh energi berkesinam-bungan. Dalam hal ini termasuk meninggalkan tenaga nuklir secara bertahap hingga tahun 2022. Sampai tahun 2020, Jerman berniat menurunkan emisi karbon dioksida dengan 40 persen dibandingkan dengan tahun 1990, bahkan sampai tahun 2050 ditargetkan penurunan sebesar 80 persen. Pada akhir tahun 2014 telah dicapai penurunan sebanyak 27 persen.

Dalam lingkungan global pun Pemerintah Jerman aktif dalam mendukung pelestarian lingkungan, kerja sama di bidang energi, dan strategi pembangunan yang ramah iklim. Jerman menjadi pendorong dalam Uni Eropa yang bertindak

sebagai pelopor kebijakan internasional perubahan iklim sejak dilaksanakannya KTT di Rio de Janeiro oleh PBB pada tahun 1992. Jerman menganut strategi menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sehingga tercipta perekonomian berkesinambungan. Alat utama yang dipakai, di samping pemanfaatan energi terbarukan, adalah peningkatan efisiensi dari energi dan sumber daya alam, serta pemakaian bijak dari bahan baku yang dapat tumbuh kembali. Berkat strategi ini, pembebanan lingkungan dan iklim menurun, dan tercipta bidang usaha dan lapangan kerja baru (https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/kategori/lingkungan-dan-iklim/pelopor-dalam-kebijakan-iklim diakses tanggal 10 Mret 2017).

Keberhasilan pencapaian target penurunan emisi Jerman didukung oleh berbagai kebijakan atau langkah yang telah dilakukan Pemerintah Jerman. Pemerintah Jerman mengalokasikan 3.3 milyar euro untuk upaya perlindungan iklim, naik dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2005. Selain itu dalam kerangka kerjasama internasional Jerman akan menyediakan dana tambahan untuk *transfer* teknologi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di negara berkembang. Dana tersebut diharapkan berasal dari perdagangan emisi dan diperkirakan mencapai 120 juta euro per tahunnya (http://www.kemlu.go.id/berlin/id/Pages /Jerman.aspx, diakses pada 27 Juni 2017).

Indonesia dan Jerman telah menjalani hubungan bilateral yang cukup panjang dan berjalan baik. Hubungan kerjasama bilateral Indonesia dengan Jerman dimulai tahun 1952 sejak diresmikannya hubungan diplomatik untuk

pertama kalinya melalui pendirian Kantor Perwakilan RI di Bonn, Jerman Barat, yang kemudian diresmikan menjadi Kedutaan Besar RI di Bonn pada tahun 1954. Hubungan Indonesia-Jerman terus ditingkatkan dalam berbagai bidang kerjasama antara lain: politik, ekonomi, perdagangan, investasi, sosial budaya dan pendidikan. Dalam hubungan kerjasama politik, kedua negara melakukan saling dukung dalam kerjasama di forum internasional. Jerman merupakan negara yang selalu mendukung integritas NKRI. Dalam hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara telah menunjukkan peningkatan kerjasama yang *progressive* dengan nilai volume perdagangan mencapai 5,99 milyar USD pada tahun 2010 (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6018&Itemid=29index.php?option=com_content&task=view&id=6018&Itemid=29, diakses pada 27 Juni 2017).

Jerman merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa Barat. Sedangkan di bidang investasi Jerman di Indonesia mencapai 157,6 juta USD dengan 51 proyek pada tahun 2010. Pemerintah RI dan Jerman juga telah menandatangani persetujuan kerjasama teknik dan keuangan yang merupakan implementasi pemberian bantuan pembangunan Pemerintah Jerman kepada Indonesia. Selain itu, pemberian fasilitas *Debt Swap* untuk mengurangi beban hutang Indonesia sejak tahun 2007 melalui program pendidikan, kesehatan, kehutanan dan lingkungan hidup (http://www.setneg.go. id/index.php?option=com_content&task=view&id=6018&Itemid=29index.php?

option=com_content&task=view&id=6018&Itemid=29, diakses pada 27 Juni 2017).

Jerman mendukung rencana Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dan dapat ditingkatkan menjadi 41% jika mendapat bantuan Internasional. Dukungan ini dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) (http://www.fo rclime.org/in dex.p hp/id/, diakses pada 10 Maret 2017).

Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) merupakan program kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jerman yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan pada *Summary Record of Negotiation* pada 2 oktober 2007. Program tersebut terdiri dari 2 (dua) modul yakni: modul Kerjasama Teknis *(Technical Cooperation)* dan Kerjasama Keuangan *(Financial Cooperation)* (http://forclimefcmalinau.blogspot.co.id / 2016/03/selayang-pandang-forclime-fc.html, diakses pada tanggal 5 Maret 2017).

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Jerman menugaskan *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) sebagai pelaksana modul Kerjasama Teknis (TC) dan modul Kerjasama Keuangan (FC) dilaksanakan oleh *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KfW). Pemerintah Indonesia menugaskan Kementerian Kehutanan yang selanjutnya di laksanakan oleh Biro Perencanaan sebagai *Program Executing Agency* (PEA) untuk kedua modul kerjasama. Modul kerjasama Keuangan (FC) memiliki 3 dasar hukum kerjasama, yakni *: Financing Agreement, Separate Agreement, and Minutes of Meeting* (MoM). Program ini memiliki sasaran untuk memberikan dukungan terhadap pengurangan emisi akibat

degradasi dan deforestasi hutan, serta melakukan konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon, sehingga mampu memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan perikehidupan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dipilih tiga kegiatan percontohan *(Demonstration Activities/DA) REDD+* di tiga kabupaten di Kalimantan, yakni Kebupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Malinau, dimana ketiga Kabupaten ini dipilih berdasarkan dengan kesepakatan dan hasil studi kelayakan sebelumnya. Biaya seluruhnya kini diperkirakan mencapai sekitar 70-80 juta euro (http://forclimefcmalinau.blogspot.co.id/2016/03/selayangpandangforclimefc.html , diakses pada tanggal 5 Maret 2017).

Kerjasama teknis (TC) dan keuangan (FC) hasil dari *Summary Record of Negotiation* 2007 tersebut kemudian ditandatangani oleh kedua negeara pada 20 April 2010 dalam bentuk persetujuan *(agreement)*.

Financial Statement telah diselesaikan untuk 3 *Demonstration Activities* (DA) pada Februari 2009. *Minutes of Meeting* (MoM) telah ditandatangani Departemen Kehutanan, Bappenas, Departemen Keuangan dan KFW pada tanggal 16 Mei 2009. Tender pengadaan konsultan pun sudah dimulai sejak Juni 2009 dan penandatanganan kontrak konsultan dilakukan pada Desember 2009 (Departemen Kehutanan, 2010).

Kegiatan di lapangan ditandai dengan penyelenggaraan *Districk Kick Off Workshop* oleh tiga kabupaten. *District Kick Off Workshop* kegiatan *Forclime Programme FC Module* telah dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Berau, Malinau (Kabupaten Kalimantan Timur), dan Kapuas Hulu (Kalimantan

Barat). *Workshop* yang menandai dimulainya program di tingkat kabupaten tersebut dilaksanakan selama dua hari di masing-masing lokasi dan merupaka kelanjutan dari *National Kick Off Workshop* yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Mei 2011. Tujuan *workshop* adalah untuk memberikan informasi tentang program *FORCLIME FC-Module* kepada instansi dan para pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten serta melakukan analisis awal tentang lokasi *Demonstration Activities* (DA). *Workshop* di Kabupaten Berau, dibuka tanggal 18 Juli 2011 Sementara itu, *District Kick Off Workshop* yang sama di Malinau dibuka tanggal 21 Juli 2011, sedangkan untuk di Kapuas Hulu *workshop* telah dilaksanakan sebulan sebelumnya yaitu pada tanggal 21-22 Juni 2011 di Putussibau (http://forestclimatecenter.org/redd/20110718%20FORCLIME%20Programme%20FC%20Module%20Kick%20Off%2Workshop%20in%20Three%20Districts%20(BAHASA).html, diakses pada 3 Maret 2017).

Kerangka program FORCLIME secara teknis terdiri dari tiga komponen. Pertama, di tatanan nasional berupa pemberian saran kebijakan bagi pemerintah pusat, pembangunan strategis dan kelembagaan. Kedua, di tingkat daerah kabupaten dengan melakukan reformasi administrasi kehutanan yang diarahkan pada pengelolaan hutan lestari dan kegiatan reduksi emisi gas karbon dari deforestasi dan degradasi. Ketiga adalah skema konservasi alam, pengelolaan sumber daya dan perbaikan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan di kawasan jantung Borneo (http://www.newstara.com/berita-2061-wah-kabupaten-malinau-masuk-program-lkh-forclime.html, diakses pada 25 April 2017).

Program FORCLIME telah menghasilkan banyak perubahan, beberapa diantaranya adalah adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan tahun 2014-2019. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Renstra Tahun 2014-2019 dengan Renstra periode sebelumnya, dimana pada Renstra yang penyusunannya didukung oleh FORCLIME telah dapat memasukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sejak adanya FORCLIME banyak kegiatan bersama yang dilakukan, salah satunya adalah untuk mendukung pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Pada tahun 2010 pembentukan KPH diusulkan dan pembiayaannya dibantu oleh GIZ. Selain itu FORCLIME telah banyak memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan *Geographic Information System* (GIS), dengan teknologi GIS pembuatan peta dapat cepat tersaji, tingkat akurasi yang baik dan tingkat koreksi yang kecil. Beberapa sistem pemetaan yang mendukung program dan sistem GIS antara lain: *Autocad Maping, Arc View, Arc Info, Map Info* dan lain sebagainya untuk menunjang kapasitas staff pemnagku kepentingan terkait sistem informasi geografis (http://www.forclime.org/index.php/id/tentang-forclime/kerjasama-teknis, diakses pada 25 April).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kerjasama Indonesia-Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui program *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) maka peneliti menggunakan beberpa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis adalah penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Anita Patimah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada

tahun 2009 yang berjudul “Kepentingan Indonesia pada Penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 2007 di Bali”. Dalam penelitian ini Anita Patimah membahas bagaimana kepentingan Indonesia pada UNFCCC 2007 di Bali sehingga Indonesia bersedia menjadi tuan rumah pada konvensi tersebut.Selain itu Anita Patimah juga menggambarkan bagaimana sejarah UNFCCC secara umum dan bagaimana politik luar negeri Indonesia terhadap pelaksanaan UNFCCC 2007 di Bali.

Kedua skripsi yang dilakukan oleh oleh Scarlet Rallsya Injaya dari Universitas Syarif Hidayatullah berupa dengan judul “Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang : Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam Skema *Asia Forest Partnership (AFP)* Periode 2008-2011”.Dalam penelitiannya Scarlet Rallsya Injaya membahas bagaimana perkembangan kesepakatan antara Indonesia dan Jepang dalam forum *Asia Forest Partenrship*periode 2008-2011. Selain itu Scarlet Rallsya Injaya juga membahas seberapa besar peran Jepang dalam forum *Asia Forest Partnership.*

Ketiga penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nadhea Lady dari Universitas Komputer Indonesia dengan judul “Kerjasama Indonesia – Norwegia Mlalui Skema *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia”.Dalam penelitiannya Nadhea membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi latar belakang kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Norwegia melalui kerangka REDD+, program-program yang dilaksanakan, kendala-kendala yang dihadapi dan tingkat keberhasilan program tersebut.

Persamaan dari penellitian yang dilakukan Anisa Patimah adalah sama-sama menggambarkan bagaimana isu perubahan iklim merupakan isu prioritas bagi Indonesia. Persamaan lainnya adalah baik penelitian yang dilakukan Patimah maupun penelitian ini adalah bagaimana peran aktif Indonesia di kancah global dalam menghadapi isu Perubahan Iklim. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Patimah dengan penelitian ini adalah jika Patimah menbahas mengenai peran dan kepentingan Indonesia dengan menjadi tuan rumah diselenggarakananya konvensi UNFCC di Bali sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi upaya indonesia dalam menghadapi perubahan iklim melalui sebuah kerangka kerjasama bilateral.

Penelitian yang dilakukan oleh Scarlet Rallysa Injani memiliki persamaan dengan penielitian ini yaitu sama-sama membahas upaya pemenuhan kepentingan Indonesia di bidang kehutanan melalui kerjasama dengan negara lain. Sedangkan perbedaannya adalah negara yang menjadi mitra kerjasama.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nadhe Lady memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kerjasama Indonesia dalam menyelamatkan hutannya melalui skema REDD+ yang merupakan produk dari COP-13 di Bali. Perbedaan yang akan ditemukan adalah perbedaan negara mitra kerjasama dan kerangka kerjasamanya.

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul ***"Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) 2010-2016 ".***

Adapun kertertarikan peneliti untuk meneliti isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya :

1. Hukum Internasional, pada mata kuliah ini mempelajari tentang hukum internasional yang di dalamnya terkait dengan pernjanjian internasional yang dilaksanakan pemerintah Indonesia-Jerman dalam kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *FORCLIME*
2. Hubungan InternasionaI di Eropa, merupakan landasan dalam mempelajari karakteristik Jerman.
3. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, matakuliah ini mempelajari tentang hubungan antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang salah satunya terkain kerjasama di kehutanan dan perubahan iklim,dimana Indonesia terletak di kawasan tersebut.
4. *Enviromental Issue,* di dalam matakuliah ini mempelajari isu-isu lingkungan hidup termasuk kehutanan dan perubahan iklim yang merupakan bidang kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Jerman.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana kerjasama Indoneisa – Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa alasan Indonesia dan Jerman melakukan kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?
2. Program apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia-Jerman dalam kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Program*me (FORCLIME) 2010-2016?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Indonesia- Jerman dalam kerjasama melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?
4. Sejauh mana tingkat keberhasilan kerjasama Indonesia-Jerman melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian mengenai kerjasama Indonesia – Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) diawali dengan *Summary Record* perundingan antar pemerintah tanggal 2 Oktober 2007 sebagai komitmen awal yang kemudian dirujuk menjadi sebuah persetujuan *(agreement)* berupa Persetujuan Kerjasama Teknik *(Technical Coorporation)* dan Persetujuan Kerjasama Keuangan *(Financial Coorporation)* yang ditandatangani pada tanggal 20 April 2010 di Jakarta. Kerjasama ini dilaksanakan selama periode 20010-2020 pada tiga area kegiatan percontohan *(Demonstration Activities)* di tiga kabupaten di Kalimantan, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Malinau. Peneliti membatasi waktu penelitian dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yakni hingga tahun 2016.

Peneliti membatasi hingga tahun 2016 karena pada tahun tersebut merupakan tahun selesainya fase pertama (2010-2012) dan fase kedua kerjasama (2013-2016), yang merupakan periode kerjasama yang ingin peneliti teliti, maka dari itu peneliti membatasai masalah kerjasama Indonesia-Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim *melalui Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) tahun 2010-2016.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat umum mengetahui kerjasama dan langkah apa saja yang dilakukan yang dilakukan oleh Indonesia dan Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa alasan Indonesia dan Jerman dalam melakukan kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016.
2. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Jerman dalam kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Indonesia dan Jerman dalam kerjasama melalu *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016 .

4. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan prospek kerjasama Indonesia-Jerman melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai Kerjasama Indonesia-Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui FORCLIME.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.